**Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science**
Vol. 4, No. 04, Oktober 2026, pp. 700~708

# Efektivitas Penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2025

**Alsa[1], Rika Neldawaty[2], Ardi Afrizal[3]**
[1-3] Universitas Muhammadiyah Jambi

**Info Artikel**

***Article history:***

Received Oct, 2026
Revised Oct, 2026
Accepted Oct, 2026

***Kata Kunci:***

Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas PAD, Kinerja Keuangan Daerah, Kota Jambi, Tahun 2025

***Keywords:***

Local Revenue, Effectiveness of Local Revenue, Local Financial Performance, Jambi City, The year 2025

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2025 menggunakan model kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang memanfaatkan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), laporan realisasi anggaran, serta berbagai literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PAD Kota Jambi selama 5 tahun secara umum berada pada kategori efektif (95,14%) dan cukup efektif (82.075%). Penerimaan PAD didukung terutama oleh pajak daerah sebagai sumber pendapatan utama, sedangkan retribusi daerah masih memerlukan optimalisasi. Efektivitas penerimaan PAD dipengaruhi oleh pengelolaan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, penetapan target yang realistis, serta kinerja pemerintah daerah, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan seluruh potensi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah.

**ABSTRACT**

The study, titled "The Effectiveness of Local Revenue (PAD) Collection in Jambi City in 2025," employed a descriptive qualitative model using a literature review method that utilized secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), budget execution reports, and various relevant sources. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the effectiveness of Jambi City's PAD revenue over the past 5 years generally falls into the "effective" (95.14%) and "fairly effective" (82.075%) categories. PAD revenue is primarily supported by local taxes as the main source of income, while local fees still require optimization. The effectiveness of PAD revenue is influenced by the management of taxes and fees, the management of local assets, the setting of realistic targets, and the performance of the local government; therefore, sustained efforts are needed to optimize the full potential of PAD to enhance fiscal autonomy and support regional development.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*

***Corresponding Author:***

Name: Alsa
Institution: Universitas Muhammadiyah Jambi
Email: saawiya702@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang memiliki peranan penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah serta membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Efektivitas penerimaan PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan melalui optimalisasi potensi daerah. Helmi (2025) menyatakan bahwa peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencerminkan semakin kuatnya kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan secara mandiri dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal melalui kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam penguatan sistem perpajakan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi administrasi perpajakan, serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel (Pratama & Widodo, 2022). Oleh karena itu, efektivitas penerimaan PAD menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

Penerimaan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sebagai wajib pajak dan wajib retribusi. Monoarfa et al. (2022) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang tidak hanya menggambarkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan dan mengelola sumber pendapatan yang berkelanjutan. Tingkat kepatuhan masyarakat, kualitas pelayanan administrasi, serta efektivitas sistem pengawasan menjadi faktor yang menentukan tercapainya target PAD. Selain itu, keberhasilan pembangunan daerah juga dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan (Romi & Umiyati, 2018).

Menurut konsep ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan pemerintah melalui berbagai bentuk pungutan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat akan berdampak pada meningkatnya potensi penerimaan daerah apabila didukung oleh sistem pengelolaan pendapatan yang efektif (Dewi, 2024). Namun, dalam praktiknya efektivitas penerimaan PAD masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, kurang optimalnya pengawasan, serta belum maksimalnya penggalian potensi pendapatan daerah. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi PAD pada beberapa daerah belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi memiliki potensi PAD yang cukup besar yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai efektivitas penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2025 untuk mengetahui tingkat pencapaian target penerimaan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan PAD pada tahun-tahun berikutnya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### *2.1 Efektivitas*

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian realisasi terhadap target PAD, maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

Menurut Ravianto dalam Masruri dan Muazansyah (2017), efektivitas merupakan sejauh mana suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mampu mencapai hasil yang diharapkan dari segi waktu, biaya, maupun kualitas. Hermawan (2017) juga menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, efektivitas penerimaan PAD dalam penelitian ini diukur melalui tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025.

### *2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber, antara lain pajak daerah, retribusi atas pelayanan publik, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya. PAD bertujuan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari implementasi kebijakan desentralisasi (Harefa et al., 2017).

PAD merupakan komponen penting dalam sistem keuangan daerah di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Optimalisasi seluruh komponen tersebut sangat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal yang kuat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas penerimaan PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan publik, sistem administrasi perpajakan, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang dimiliki.

### *2.3 Kinerja Keuangan Daerah*

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah adalah tingkat efektivitas penerimaan PAD. Keuangan daerah mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik (Anandita et al., 2024).

Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sebaliknya, apabila realisasi PAD masih berada di bawah target, maka diperlukan evaluasi terhadap sistem pemungutan, pelayanan kepada wajib pajak, pengawasan, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah. Dengan demikian, analisis efektivitas penerimaan PAD dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

### *2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PAD*

#### 2.4.1 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin baik pemerintah daerah mengelola dan memungut pajak, semakin besar penerimaan yang diperoleh. Oleh karena itu, keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap tercapainya target PAD.

#### 2.4.2 Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi daerah berasal dari pembayaran masyarakat atas layanan atau fasilitas yang disediakan pemerintah. Apabila pemungutan retribusi dilakukan secara optimal, maka penerimaan PAD akan meningkat. Sebaliknya, jika pemungutan belum berjalan dengan baik, penerimaan PAD juga akan ikut menurun.

#### 2.4.3 Pengelolaan Aset Daerah

Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara produktif. Pengelolaan aset yang baik akan memberikan tambahan penerimaan bagi daerah sehingga dapat mendukung pencapaian target PAD.

#### 2.4.4 Optimalisasi Sumber Pendapatan Lainnya

Selain pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan aset, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatan lain yang sah. Pengelolaan seluruh sumber pendapatan tersebut secara maksimal akan membantu meningkatkan penerimaan PAD dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pendapatan saja.

#### 2.4.5 Penetapan Target Pendapatan

Target PAD harus disusun berdasarkan potensi dan kondisi daerah. Target yang realistis akan lebih mudah dicapai, sedangkan target yang terlalu tinggi dapat menyebabkan realisasi PAD terlihat rendah meskipun penerimaannya mengalami peningkatan.

#### 2.4.6 Kinerja Pemerintah Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi penerimaan PAD sangat memengaruhi efektivitasnya. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan realisasi pendapatan, sedangkan pengelolaan yang kurang optimal dapat menghambat pencapaian target.

#### 2.4.7 Konsistensi Pengelolaan PAD

Efektivitas PAD tidak hanya bergantung pada satu tahun anggaran, tetapi juga pada konsistensi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan setiap tahun. Upaya yang dilakukan secara berkelanjutan, seperti memperbaiki sistem pemungutan dan menggali potensi pendapatan baru, akan membantu menjaga bahkan meningkatkan efektivitas PAD di masa mendatang.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi Tahun 2025 secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena berdasarkan data kontekstual sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai literatur dan dokumen resmi sebagai sumber data utama.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), laporan realisasi anggaran, serta berbagai buku, artikel ilmiah, dan jurnal nasional maupun internasional yang membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas penerimaan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber informasi yang kredibel, antara lain Google Scholar, Publish or Perish, DJPK, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat efektivitas penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2025, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target penerimaan daerah sebagai dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan PAD pada masa yang akan datang.

### 3.1 Rumus Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi PAD dengan target penerimaan yang disusun berdasarkan potensi riil daerah.

$$\textbf{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\textbf{Realisasi PAD}}{\textbf{Target PAD}} \text{ x } 100$$

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD, sehingga dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas yang dihasilkan, semakin baik kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target penerimaan PAD. Sebaliknya, apabila realisasi PAD masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber PAD masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, analisis rasio efektivitas menjadi salah satu indikator penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli

Daerah serta sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan penerimaan PAD pada periode berikutnya.

Tabel 1. Target, Realisasi, dan Rasio Efektivitas PAD Kota Jambi Tahun 2021–2025

| Tahun | Target PAD (Miliar Rupiah) | Realisasi PAD (Miliar Rupiah) | Rasio Efektivitas (%) | Kriteria |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 419,56 | 384,73 | 91.70 | Efektif |
| 2022 | 465,89 | 436,89 | 93.77 | Efektif |
| 2023 | 515,34 | 415,90 | 80.70 | Cukup Efektif |
| 2024 | 545,54 | 455,26 | 83.45 | Cukup Efektif |
| 2025 | 606,28 | 605,98 | 99.95 | Efektif |

*Sumber: Data APBD Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021-2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

### 4.2 Kriteria Tingkat Efektivitas

Kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut**.**

Tabel 2. Tingkat Rasio Efektivitas

| Rasio Efektivitas | Kriteria |
|---|---|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90%-100% | Efektif |
| 80%-89% | Cukup Efektif |
| 60%-79% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

*Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996*

Berdasarkan Tabel 1, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama periode 2021–2025 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Rasio efektivitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD yang telah ditetapkan. Semakin besar persentase rasio efektivitas, maka semakin baik kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam mencapai target penerimaan PAD.

Pada tahun 2021, target PAD sebesar Rp419,56 miliar dan realisasinya mencapai Rp384,73 miliar. Dengan rasio efektivitas sebesar 91,70%, penerimaan PAD termasuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2022, efektivitas meningkat menjadi 93,77% dengan realisasi sebesar Rp436,89 miliar dari target Rp465,89 miliar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan pencapaian target PAD dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, pada tahun 2023 efektivitas penerimaan PAD menurun menjadi 80,70% sehingga masuk dalam kategori cukup efektif. Penurunan ini terjadi karena realisasi PAD hanya mencapai Rp415,90 miliar dari target sebesar Rp515,34 miliar. Pada tahun 2024, rasio efektivitas sedikit meningkat menjadi 83,45%, tetapi masih berada pada kategori cukup efektif karena realisasi PAD sebesar Rp455,26 miliar belum mencapai target Rp545,54 miliar.

Pada tahun 2025, efektivitas penerimaan PAD kembali meningkat secara signifikan. Dari target sebesar Rp606,28 miliar, realisasi PAD mencapai Rp605,98 miliar atau sebesar 99,95%, sehingga kembali masuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi hampir berhasil mencapai seluruh target PAD yang telah ditetapkan.

Secara garis besar, efektivitas penerimaan PAD Kota Jambi selama periode 2021–2025 berada pada kategori efektif dan cukup efektif. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024,

efektivitas penerimaan kembali meningkat pada tahun 2025 hingga hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola PAD semakin baik, namun tetap diperlukan upaya optimalisasi agar efektivitas penerimaan dapat mencapai kategori sangat efektif pada tahun-tahun berikutnya.

### 4.3 Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk mengetahui kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam membentuk total PAD Kota Jambi. Analisis ini menggambarkan peran pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah dalam mendukung penerimaan daerah. Dengan menganalisis setiap komponen PAD, dapat diketahui sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar maupun yang masih perlu dioptimalkan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun strategi untuk meningkatkan penerimaan PAD serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3. Perkembangan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2021-2025

| Tahun | Komponen PAD | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pajak Daerah | | Retribusi Daerah | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | Lain-Lain PAD yang sah | |
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2021 | 270,86 | 244,73 | 47,88 | 51,84 | 9,60 | 9,64 | 91,23 | 78,52 |
| 2022 | 317,88 | 301,80 | 49,76 | 40,22 | 9,60 | 10,53 | 88,64 | 84,34 |
| 2023 | 355,00 | 301,36 | 56,23 | 36,13 | 10,00 | 10,64 | 94,11 | 67,77 |
| 2024 | 390,00 | 330,06 | 60,19 | 32,37 | 10,53 | 18,91 | 84,82 | 73,93 |
| 2025 | 466,57 | 483,31 | 40,00 | 29,82 | 17,10 | 17,10 | 82,61 | 75,75 |

*Sumber: Data APBD Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Berdasarkan Tabel 3, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama tahun 2021–2025 didominasi oleh Pajak Daerah yang menunjukkan tren peningkatan baik pada target maupun realisasi. Realisasi Pajak Daerah meningkat dari Rp244,73 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp483,31 miliar pada tahun 2025. Bahkan pada tahun 2025, realisasi penerimaan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan semakin optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak daerah.

Sementara itu, Retribusi Daerah menunjukkan tren yang cenderung menurun. Meskipun pada tahun 2021 realisasi retribusi mampu melampaui target, pada tahun-tahun berikutnya realisasinya terus menurun dan belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerimaan retribusi daerah masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap objek retribusi.

Pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasi penerimaan cenderung stabil dan mampu mencapai target pada sebagian besar periode pengamatan. Bahkan pada tahun 2024 realisasi mencapai Rp18,91 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan target sebesar Rp10,53 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset dan penyertaan modal daerah telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.

Adapun Lain-Lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang cukup besar setelah Pajak Daerah. Namun, realisasinya masih berada di bawah target pada setiap tahun pengamatan. Meskipun demikian, komponen ini tetap menjadi salah satu sumber penerimaan yang mendukung peningkatan PAD Kota Jambi.

Jadi, perkembangan PAD Kota Jambi selama tahun 2021-2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan adanya peningkatan penerimaan, terutama yang bersumber dari Pajak Daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan PAD ke depan perlu difokuskan pada optimalisasi penerimaan pajak serta perbaikan pengelolaan retribusi daerah agar seluruh komponen PAD dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap pendapatan daerah.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan tingkat efektivitas yang menyebabkan pencapaian PAD berada pada kategori cukup efektif. Namun demikian, pada tahun 2025 kinerja penerimaan PAD kembali mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PAD Kota Jambi. Oleh karena itu, keberlanjutan peningkatan PAD perlu didukung melalui penguatan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah. Dengan upaya tersebut, Pemerintah Kota Jambi diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

Anandita Vivian Salsa Billa, Widiyastuti, M., Yonata, O., & Sari, Y. L. (2024). Analisis sistem pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai kinerja pembangunan di Kelurahan Bandar Jaya Timur. Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan, 1(3), 173–182.

Badan Litbang Depdagri RI, & FISIPOL UGM. (1991). Pengukuran kemampuan keuangan daerah.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage Publications.

Dewi, N. A. (2024). Dinamika pemikiran ekonomi: Konstruksi pemikiran sistem ekonomi abad klasik, pertengahan, dan kontemporer. Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies, 2(1), 72–83.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Portal data APBD. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). Optimalisasi kebijakan penerimaan daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Helmi, S. R. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, produk domestik regional bruto dan populasi terhadap pengeluaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013–2023.

Hermawan, H. (2017). Efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3(1), 150–167.

Masruri, M., & Muazansyah, I. (2017). Analisis efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP). Journal of Governance and Public Policy, 4(2), 363–393.

Monoarfa, M., Olilingo, F. Z., & Santoso, I. R. (2022). Analysis of the effect of entertainment tax, hotel tax, and restaurant tax on regional original income (PAD) in Gorontalo City 2014–2018. European Journal of Research Development and Sustainability, 3(1), 84–87.

Pratama, A., & Widodo, T. (2022). Pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia: Pendekatan sektor infrastruktur dan digitalisasi. Jurnal Ekonomi Indonesia, 19(3), 215–230.

Romi, S., & Umiyati, E. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 7(1), 1–7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004).